



Media: Merapi

Hari: Senin

Tanggal: 19 Oktober 2020

Halaman: 2

PEMKOT BAGIKAN ALAT DISINFEKSI KE KAMPUNG-KAMPUNG

Wawali: Protokol Kesehatan Jangan Jadi Beban

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta terus membagikan peralatan disinfeksi guna mendukung upaya warga mencegah persebaran virus corona penyebab COVID-19.

"Peralatan ini dimanfaatkan untuk kegiatan kerja bakti bersama di wilayah," kata Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Yogyakarta Herie Poerwadi di Yogyakarta, Sabtu (17/10).

Sebelumnya, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta Iswari Mahendrarko mengatakan bahwa bantuan peralatan disinfeksi diberikan melalui kampung tangguh bencana (KTB) atau pengurus kampung.

"Tujuannya untuk mendukung masyarakat dan relawan di KTB atau kampung untuk melakukan disinfeksi. Selain peralatan, juga ada bantuan berupa alat pelindung diri yaitu faceshield, masker, sarung tangan, dan baju hazmat," katanya. Dia menambahkan, penye-

rahan bantuan sudah dilakukan sejak pekan lalu.

Herie mengemukakan bahwa masyarakat juga harus terus diingatkan agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

Ia menegaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk menghindari penularan COVID-19 selain disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas.

"Tidak boleh merasa bahwa penerapan protokol kesehatan itu menjadi sebuah beban yang memberatkan karena pada kenyataannya pandemi yang sudah berlangsung selama sekitar tujuh bulan ini belum hilang," kata Wakil Wali Kota Yogyakarta itu seperti dilansir Antara.

Selama kasus penularan COVID-19 masih ada di Kota Yogyakarta maupun di wilayah lain, ia mengatakan, protokol kesehatan harus terus dijalankan.

Ia khawatir jika masyarakat, pelaku usaha, hingga pemerin-

tah mulai kendor dalam penerapan protokol kesehatan, maka yang akan terjadi adalah peningkatan kasus COVID-19.

"Kalau kasus semakin meningkat maka pemulihan ekonomi juga bisa semakin panjang, persoalan sosial semakin banyak, dan potensi kehilangan pendapatan juga semakin besar," katanya.

Di Karanganyar, Satgas Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 Kabupaten Karanganyar mengungkap kemunculan kluster keluarga dan perkantoran dalam kasus infeksi virus tersebut.

Sekda Pemkab Karanganyar, Sutarno mengatakan, tim sedang menangani kluster perkantoran, di mana ASN di dua organisasi perangkat daerah telah terpapar.

"Ada yang tertular suaminya yang kerja sebagai nakes. Lalu delapan stafnya diminta istirahat sampai 14 hari. Kami tidak menerapkan work from home (WFH). Mereka yang kontak erat secara mandiri isolasi di rumah. Instansi vertikal maupun horizontal lebih ketat menerapkan prokes," kata Sekda Sutarno di hadapan anggota Satgas di ruang anatorium rumah dinas bupati Karanganyar, Sabtu (17/10).

Tim masih melakukan tracing pada kluster perkantoran melalui swab tes PCR. Metode tracing ini diterapkan di perkantoran non OPD seperti polres, kodim, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya. Sedangkan untuk kluster keluarga, jumlahnya mendominasi kasus di Karang-

Instansi	Nilai Berita	
1. BPBD	☐ Negatif	☐ An
2.	☐ Positif	☐ Se
3.	☐ Netral	☐ Bi
4.		
5.		

Netral
✓ biasg
✓ untuk difet



MERAPI-ABDULALIM

Proses pemakaman jenazah korban Covid-19 di Karanganyar. Di kota itu Corona sudah menginfeksi ratusan orang.

anyar. Disiplin protokol kesehatan selama isolasi mandiri kurang diterapkan. Berdasarkan laporan Dinkes per Jumat (16/10), Covid-19 menginfeksi 117 orang.

Dari jumlah itu 700 orang kontak erat, 91 suspek dan 62 rawat inap. Sutarno mengatakan, tingkat kesembuhan 76,39 persen sedangkan angka kematian 6,26 persen.

Masyarakat perlu mengetahui gejala luar infeksi Covid-19. Terbanyak demam 47,4 persen, sesak napas 42,1 persen dan

batuk 43,27 persen.

Sementara itu terkait edukasi ke masyarakat, Tim Satgas Pemulihan Ekonomi dan Penanganan Covid-19 Karanganyar dibekali Perbup No.84/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Pedoman Tata Normal Baru Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. Di dalamnya memuat sanksi dan denda bagi warga abai proses.

Dalam perjalanannya, Satgas juga melaporkan resistensi kala-

ngan pedagang pasar tradisional dan hajatan dalam menerapkan proses.

Sementara itu ia menyebut struktural Satgas juga ada yang membidangi pemulihan ekonomi.

"Yang penanganan ekonomi, Pemkab sudah menganggarkan. Bansos sudah dilaksanakan, bantuan-bantuan UMKM sudah dikururkan. Ada bantuan dari pusat juga. Nanti diidentifikasi mana yang perlu dibantu dengan sumber APBD kabupaten," katanya. (Lim)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			

Yogyakarta, 26 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005